

**EVALUASI DAMPAK PEMBANGUNAN PARIWISATA
MENGUNAKAN KONSEP *COMMUNITY BASED TOURISM*
(*CBT*) DI KAWASAN WISATA TEBING BREKSI**
*Evaluation of The Impact Tourism Development Using the Concept
Community Based Tourism in The Tourist Area Tebing Breksi*

Nurwanto

Alumni Magister Manajemen dan Kebijakan Publik
FISIPOL UGM

Jl.Susio Yustisia No.1, Karang Malang, Caturtunggal, Kec. Depok,
Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281
nurwanto@gmail.com

Diterima: 15 Juni 2020. Disetujui: 18 November 2020. Dipublikasikan: 30 Desember 2020

Abstrak

Dewasa ini, perkembangan pariwisata suatu daerah akan mendatangkan dampak positif bagi masyarakat sekitar. Akan tetapi, jika masyarakat tidak siap menerima pembangunan dan tidak mengelola dengan baik justru akan menimbulkan dampak negatif. Berbagai permasalahan akan timbul dengan adanya *mass tourism* sehingga menyulitkan bahkan merugikan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini membahas evaluasi dampak pembangunan pariwisata di Tebing Breksi dengan menggunakan konsep *Community Based Tourism (CBT)*. *CBT* merupakan strategi pembangunan yang menggunakan pariwisata sebagai alat untuk memperkuat komunitas lokal yang dikelola oleh, dari, dan untuk masyarakat, serta mempertimbangkan aspek keberlangsungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan ialah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data yang digunakan bersumber dari data primer (wawancara narasumber yang dinilai kompeten di bidangnya) dan sekunder (data dari kajian sebelumnya, dokumentasi, notulensi, dan laporan kegiatan yang berkaitan dengan Tebing Breksi). Evaluasi prinsip *CBT* di Tebing Breksi dilihat berdasarkan lima aspek, yaitu (i) prinsip ekonomi, (ii) prinsip sosial, (iii) prinsip budaya, (iv) prinsip lingkungan dan (v) prinsip politik beserta indikatornya. Hasil analisis menunjukkan bahwa prinsip-prinsip *CBT* yang diterapkan di Tebing Breksi secara keseluruhan sudah menunjukkan keberhasilan walaupun dari beberapa indikator prinsip *CBT* perlu dioptimal lagi. Dampak positif yang diperoleh masyarakat dari *CBT* ini adalah meningkatnya pendapatan ekonomi, meningkatnya kualitas hidup, kepedulian terhadap manajemen pengelolaan sampah, dan saling menghormati antar budaya. Selain itu, keberhasilan *CBT* tidak lepas dari peran aktif masyarakat serta dukungan pemerintah.

Kata Kunci: *Communnity Based Tuourism*, dampak pariwisata, evaluasi

Abstract

Nowadays the development of tourism in an area will bring a positive impact on the local society. However, if the community is not ready to accept development and is not ready to manage its property, it will have a negative impact. Various problems will arise with the existence of mass tourism which makes it difficult or even detrimental to the community. Therefore, this study will discuss the evaluation of the impact tourism development in Tebing Breksi using the concept of community-based tourism (CBT). CBT is a development strategy that uses tourism as a tool to strengthen local communities that are managed by, from, and for the community, as well as considering aspects of sustainability to improve people's welfare. The research method used is qualitative using a case study approach. The data used is sourced from primary data and secondary data. Primary data obtained by interviewing speakers who are considered competent in their fields and following the research topic. Secondary data were obtained from previous studies, documentation, a note, and an activity report related to Tebing Breksi. Evaluation of CBT principles at Tebing Breksi is seen based on five aspects, that is (i) Economic principles (ii) Social principles (iii) Cultural principles (iv) Environmental principles (v) Political principles, along with indicators. The result of the analysis shows that the principles of CBT applied at Tebing Breksi as a whole have shown success even though some of the indicators of the CBT principle need to be optimized again, while the positive impact obtained by the community with the presence of this CBT is increased economic income, improved quality of life, concern for waste management and mutual respect between cultures. Also, the success of CBT cannot be separated from the active role of community and government support.

Keywords: *Communnity Based Tuourism, Evaluation, Tourism Impact*

© 2020 Direktorat Kajian Strategi

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Penelitian ini membahas evaluasi dampak pembangunan pariwisata dengan menggunakan konsep *Community Based Tourism (CBT)* di kawasan wisata Tebing Breksi dalam rangka pembangunan pariwisata yang berkelanjutan (*sustainable tourism*).¹ Berkembangnya pariwisata di suatu daerah akan mendatangkan banyak manfaat bagi masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, dan budaya (Sutawa, 2012). Akan tetapi, jika masyarakat tidak siap menerima

akan pengembangannya dan tidak dapat mengelola dengan baik, justru akan menimbulkan berbagai permasalahan yang menyulitkan atau bahkan merugikan masyarakat (Ndlovu, et al. 2011).

CBT berkaitan erat dengan pembangunan pariwisata berkelanjutan. Beberapa ahli pariwisata seperti Murphy (1985:39) dan Woodley (1993:137) menegaskan bahwa pendekatan pembangunan berbasis masyarakat (*CBT*) merupakan syarat menuju keberlanjutan pariwisata. Inskip (1994:8) berpendapat bahwa

¹ *Sustainable Tourism* menurut UNWTO (*United National World Tourism Organization*) adalah pariwisata yang memperhitungkan sepenuhnya dampak ekonomi, sosial dan lingkungan saat ini

dan masa depan, menangani kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan dan masyarakat sebagai tuan rumah (*host*).

pembangunan pariwisata berkelanjutan menekankan pada aspek komunitas. Anstrand (2006:14) menambahkan bahwa *CBT* merupakan strategi pembangunan dengan menggunakan pariwisata sebagai alat untuk memperkuat kemampuan masyarakat dalam mengorganisasi dan mengelola sumber daya melalui partisipasi masyarakat lokal. Dengan demikian, harapan pariwisata yang berkelanjutan dapat terwujud.

Community Based Tourism (CBT), wisata berbasis masyarakat, inilah yang sedang digencarkan oleh Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Wisata berbasis masyarakat ini menjadi sebuah inisiatif warga desa untuk menemukan dan mengenali potensi wisata di daerah mereka lalu mengembangkannya menjadi destinasi wisata yang kreatif, inovatif, dan unik, serta menarik bagi para wisatawan nusantara maupun luar negeri (Media Indonesia, 2019). Daerah Istiwewa Yogyakarta sendiri mempunyai berbagai pilihan wisata serta beraneka ragam wisata mulai dari bangunan bersejarah hingga fenomena alam.

Salah satu wilayah yang memiliki objek wisata yang menarik yaitu di Kabupaten Sleman. Kabupaten Sleman mempunyai beberapa wisata candi dan peninggalan pertambangan batu kapur yang dulunya bekas letusan Gunung Api Purba yang saat ini dikenal dengan nama Taman Tebing Breksi. Nama *Breksi* berawal dari para *buyer* asing atau pembeli batu dari luar wilayah Sleman yang sering menyebut bebatuan di sana dengan nama Breksi. Ternyata kata *Breksi* menular ke lidah masyarakat setempat sehingga dipakailah nama itu hingga saat ini.

Selain itu, Tebing Breksi termasuk dalam wisata populer pada ajang Anugerah Pesona Indonesia (API) sebagai juara pertama wisata baru terpopuler tahun 2017. API merupakan

rangkaian kegiatan tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintah dalam upaya membangkitkan apresiasi masyarakat terhadap pariwisata Indonesia.

Kawasan wisata alam Tebing Breksi berada di Desa Sambirejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman. Kawasan ini terbentuk bukan karena unsur kesengajaan melainkan merupakan kawasan pertambangan batu. Akibat kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh warga sekitar, daerah tersebut menghasilkan sebuah seni yang indah. Sisa galian tambang menghasilkan goresan indah pada dinding tebing. Kondisi tersebut mengundang kedatangan wisman untuk sekadar melihat-lihat bahkan tidak sedikit mengabadikan gambar di lokasi. Oleh karena itu, timbullah ide masyarakat sekitar yang didukung oleh pemerintah daerah untuk menjadikan Tebing Breksi menjadi objek wisata.

Pada tahun 2014 berdasarkan keputusan Kepala Badan Geologi RI No 1157K/40/BGL/2014, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan Tebing Breksi sebagai cagar alam geologi (*geoheritage*). Pada mulanya (tahun 1999—2000-an), banyak penelitian yang dilakukan di sana. Hasilnya sangat mengejutkan, yaitu batu kapur breksi ini rupanya endapan abu vulkanik dari erupsi Gunung Api Purba Ngelanggeran. Bebatuan Breksi merupakan salah satu sejarah pembentukan pulau Jawa. Itulah sebabnya mengapa Tebing Breksi perlu dilestarikan sebagai cagar budaya alam situs *geoheritage*. Artinya, situs *geoheritage* ini memiliki nilai-nilai penting di bidang keilmuan, pendidikan, budaya, dan nilai estetika.

Berdasarkan fenomena tersebut wisata Tebing Breksi menjadi hal yang menarik untuk dikaji dan diteliti lebih jauh lagi. Upaya masyarakat mengembangkan Tebing Breksi hingga populer seperti saat ini dan penerapan

prinsip-prinsip *CBT* yang baik menarik untuk diteliti. Ini akan membuat kehidupan masyarakat lebih maju atau bahkan sebaliknya. Untuk itu, dalam menganalisis *Community Based Tourism* di Kawasan Wisata Tebing Breksi digunakan beberapa prinsip dan indikator yang dikembangkan oleh (Suansri, 2003:20).

Definisi *CBT* yang dikemukakan

oleh (Suansri, 2003:14) dalam bukunya adalah sebagai berikut.

“Community based tourism is tourism that takes environmental, social, and cultural sustainability into account. It is managed and owned by the community, for the community, with the purpose of enabling visitors to increase their awareness and learn about the community and local ways of life”.

Tabel 1. Prinsip dan indikator *Community Based Tourism*

Suansri (2003)	Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Timbulnya dana untuk pengembangan komunitas • Terciptanya lapangan pekerjaan sektor pariwisata. • Timbulnya pendapatan masyarakat lokal
	Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas hidup. • Peningkatan kebanggaan komunitas. • Pembagian peran yang adil (gender, usia). • Membangun organisasi manajemen komunitas
	Budaya	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong masyarakat menghormati budaya lain. • Membantu perkembangan pertukaran budaya • Menanamkan perkembangan dalam budaya lokal
	Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran mengenai <i>carrying capacity</i> (daya dukung) • Manajemen pengelolaan sampah • Kepedulian terhadap konservasi
	Politik	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya partisipasi masyarakat lokal • Peningkatan kekuasaan komunitas yang lebih luas • Mekanisme yang menjamin hak masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam (sda)

Sumber: Suansri, 2003

Berdasarkan pengertian tersebut, diketahui bahwa *CBT* merupakan salah satu konsep pengembangan pariwisata yang mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan, sosial, dan budaya. Pariwisata yang dikelola dan dimiliki oleh masyarakat dipergunakan untuk kepentingan masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesadaran para wisatawan tentang kehidupan masyarakat setempat (Hausler, 2005).

Berangkat dari konsep *Community Based Tourism (CBT)*, Murphy (1985) menjelaskan bahwa pariwisata adalah suatu fenomena yang kompleks dan memiliki dampak penting bagi masyarakat dan berbagai pemangku

kepentingan (*stakeholders*) pada destinasi. Ketika hal itu berkembang, pariwisata dapat menjadi sumber keuntungan maupun penyebab efek negatif pada tatanan sosial, lingkungan, dan ekonomi. Masyarakat harus proaktif dalam mengontrol dan mengambil keputusan melalui proses yang dihasilkan dari bawah ke atas (*bottom-up*) untuk membangun pariwisata yang berkelanjutan. Gill & Reed (1997) dan Mowforth & Munt (2003) dalam Johnson (2010) menjelaskan bahwa *Community Based Tourism (CBT)* berbeda dari pendekatan perencanaan pariwisata *top-down* tradisional, yang menekankan input lokal dan kontrol atas jenis, skala,

dan intensitas pembangunan pariwisata. Jika masyarakat mampu mempertahankan atau proaktif dalam mengontrol pengambilan keputusan, masyarakat dapat mengarahkan pembangunan pariwisata sesuai dengan nilai-nilai dan kepentingan mereka (Othman, Sazali, dan Mohammed, 2013:65-75).

Tahap pembangunan dimulai dari perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan sampai dengan pemantauan (monitoring) dan evaluasi. Masyarakat setempat harus dilibatkan secara aktif dan diberi kesempatan untuk berpartisipasi karena tujuan akhirnya ialah meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat (Garrod, 2001). Pada konsep ini masyarakat dijadikan sebagai pelaku utama dalam pengembangan *CBT* dan berperan dalam semua lini pembangunan baik sebagai perencana, investor, pelaksana, pengelola, pemantau, maupun evaluator (Demartoto, 2009). Keberhasilan penerapan *CBT* sangat tergantung pada karakteristik dan kondisi masyarakat/komunitas di destinasi wisata sehingga pelaksanaan *CBT* di wilayah satu dengan yang lainnya dapat berbeda (Suansri, 2013).

2. Rumusan Masalah

Secara umum pengembangan pariwisata belum banyak menyentuh aspek kehidupan masyarakat di sekitar destinasi wisata. Masyarakat lokal pada umumnya masih menjadi objek pengembangan pariwisata, belum berperan aktif, baik sebagai pelaku usaha maupun penerima manfaat ekonomi. Jika pariwisata dijadikan sebagai komoditas utama, sangat menjanjikan untuk dikemas menjadi peluang bisnis. Banyak negara mulai serius menggarap sektor pariwisata sebagai sektor andalan untuk meningkatkan perekonomian, tidak terkecuali Indonesia yang kaya akan sumber daya alam dan budaya sebagai

potensi daya tarik wisata. (Wiwin, 2018:69).

Secara global, *United National Environment/UNEP* merumuskan beberapa masalah dalam pariwisata berikut ini.

- a. Pengembangan pariwisata tidak berorientasi pada pertumbuhan ekonomilokal.
- b. Pembangunan pariwisata mengabaikan norma-norma sosial pariwisata sehingga tidak ada harapan untuk membangun kesadaran dan kapasitas masyarakat untuk mempertahankan serta meningkatkan kualitas lingkungan di wilayah mereka.
- c. Pengembangan pariwisata bergantung pada integritas ekosistem dan tidak terintegrasi dengan upaya konservasi dan penerapan prinsip daya dukung.
- d. Pengembangan pariwisata tidak termasuk dalam pengembangan masyarakat lokal dan memperkuat organisasi tempat tujuan.

Secara spesifik, hambatan pariwisata di dalam *CBT* dapat diuraikan sebagai berikut. Hambatan pertama bersumber dari komitmen yang rendah dalam kerjasama *stakeholders*. Pengembangan *CBT* cenderung menuntut proses yang lebih lama dan hasilnya tidak dapat dipetik secara langsung dalam waktu singkat. Hambatan subjektif yang ada di dalam masyarakat ialah masih adanya mispersepsi bahwa pengembangan pariwisata merupakan tanggung jawab pemerintah. Bagi masyarakat pedesaan, keterlibatan masyarakat dalam perencanaan kurang diminati karena kebutuhan yang paling nyata ialah bagaimana pariwisata memberikan dampak positif pada kehidupan sosial mereka (Li, 2006).

Hambatan kedua ialah kelangkaan

modal. *CBT* dikelola oleh masyarakat dengan modal yang terbatas dan kelangkaan jaringan untuk memperoleh kredit dari berbagai lembaga formal. Pada umumnya, pengusaha kecil pada sektor pariwisata tidak memperoleh kemudahan fasilitas kredit untuk menjalankan roda kegiatan (Saville, 2001). Fakta ini mempertegas kontradiksi yang serius dalam kebijakan pariwisata karena di satu sisi pariwisata dijadikan alat untuk memperluas peluang kerja dan berusaha tetapi di sisi lain pembiayaan untuk memudahkan pencapaian sasaran itu tidak disediakan secara memadai.

Hambatan ketiga terkait dengan konsistensi kebijakan pemerintah. Contohnya ialah rendahnya konsistensi kebijakan pemerintah, minimnya keseriusan pemerintah untuk memajukan industri pariwisata sebagai salah satu sumber utama penerimaan negara di masa depan, serta kurang dapat menekan dampak negatif perkembangan pariwisata, dengan begitu implementasi program *CBT* yang diharapkan mampu menginduksi peluang ekonomi bagi masyarakat tidak pernah terwujud (Damanik, 2005). Melihat permasalahan-permasalahan tersebut, diharapkan melalui pengembangan *CBT* sektor pariwisata dapat menjadi instrumen pembangunan yang lebih menyejahterakan masyarakat serta memastikan keberlangsungan pariwisata secara *sustainable* agar dapat dirasakan generasi-generasi selanjutnya dengan menekankan dampak efek negatif dari pembangunan pariwisata tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikemukakan pertanyaan penelitian ialah bagaimana dampak ekonomi, sosial, budaya, lingkungan dan politik yang ditimbulkan dari kegiatan wisata di kawasan Tebing Breksi?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus (*case study*). Alasan penggunaan metode kualitatif didasarkan asumsi bahwa pariwisata tidak cukup hanya dipahami sebagai realitas saja (hitam-putih), namun juga harus dianalisis secara realitas kritis, serta dikonstruksikan secara lokal dan spesifik (Denzin dan Lincoln, 2009). Penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian, secara holistik dan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, yang dilakukan pada suatu konteks yang alamiah dengan menggunakan metode alamiah (Moleong, 2006:6). Studi kasus yang digunakan dalam bidang evaluasi akan mengembangkan analisis mendalam atas suatu kasus, seringkali program, aktivitas, proses, satu individu atau lebih, sehingga dianggap komprehensif dalam mengembangkan pemahaman yang mendalam (Creswell, 2014:4).

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dua komponen utama yaitu. Pertama data primer, data yang dikumpulkan dan diperoleh secara langsung di lapangan (Lofland dalam Moleong 2006:157).

Data primer penelitian ini diperoleh dari narasumber penelitian yang dianggap kompeten dalam menjelaskan dampak pembangunan pariwisata di kawasan Tebing Breksi. Data sekunder diperoleh dari berbagai literatur pendukung atau dokumen yang telah dikumpulkan dan terkait dengan objek penelitian, yaitu data statistik Desa Sambirejo, dokumen-dokumen dari pengelola Tebing Breksi, laporan kepariwisataan Kabupaten Sleman DIY, dan penelitian-penelitian sebelumnya terkait kawasan Tebing Breksi.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi beberapa hal.

Pertama, observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap objek, situasi, dan kondisi dilapangan. Aspek yang diamati oleh peneliti antara lain, pelaku aktivitas ekonomi masyarakat di lokasi pariwisata, situasi sosial di sekitar objek destinasi wisata, interaksi antara wisatawan dan komunitas, kondisi jalan, dan fasilitas bangunan yang tampak lainnya. Kedua, wawancara yang dilakukan secara mendalam (*in-depth interview*) terhadap narasumber. Yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah pengelola, pemerintah, masyarakat lokal, dan wisatawan. Ketiga, dokumentasi dan terakhir, keempat, penggabungan data atau triangulasi.

Teknik analisis data pada penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan. Pertama, pengumpulan data, keseluruhan data yang ada di lapangan berupa data observasi, wawancara dan studi dokumentasi dikelompokkan dan disusun sesuai dengan tema. Kedua, reduksi data, yakni data yang diperoleh di lapangan direduksi dan dipilih lalu disusun secara sistematis. Ketiga, penyajian data digambarkan dengan menggunakan tabel-tabel, gambar, grafik, matrik, dan draf inti wawancara yang memungkinkan peneliti lebih mudah untuk menganalisis data. Keempat, penarikan kesimpulan, yakni semua data yang telah dikategorisasi dan disusun secara sistematis dilihat pola hubungannya dan dirumuskan dalam bentuk kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi prinsip *Community Based Tourism* yang ada di Tebing Breksi dilakukan oleh peneliti dengan melihat aspek setiap dimensi yang dikemukakan oleh Suansri, yaitu aspek ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan politik.

1. Prinsip Ekonomi

- a. Timbulnya Dana untuk Pengembangan Komunitas

Ada beberapa dana alokasi untuk komunitas yang ada di Tebing Breksi. Komunitas yang dimaksud di sini adalah masyarakat atau penduduk lokal Desa Sambirejo, baik yang tergabung dalam pengelola maupun kelompok sadar wisata (pokdarwis). Berdasarkan hasil wawancara dengan Penasihat Pengelola Tebing Breksi pada tanggal 15 Mei 2019, anggaran dana alokasi untuk komunitas di Tebing Breksi dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu, pertama, dana dari Gubernur yang dibagi beberapa tahap.

“Pertama untuk pembuatan *amphitheatre* sebesar Rp200 juta. Kemudian, pada tahun 2015 diperoleh bantuan sebesar Rp750 juta dari Gubernur untuk pembuatan *landscape*, kuliner, dan masjid. Pada tahun 2016 diperoleh bantuan lagi sebesar Rp500 juta untuk penyempurnaan *landscape*, pembangunan *spot* kuliner, dan pembangunan masjid yang belum selesai. Selanjutnya, tahun 2017 Tebing Breksi mendapatkan bantuan lagi sebesar Rp750 juta untuk pembangunan *embung* yang ada di sebelah barat Tebing Breksi. Totalnya mencapai 2,2 miliar.”

Salain alokasi dana dari Gubernur, ada bermacam bantuan yang diterima oleh Desa Sambirejo terkait wisata Tebing Breksi, yaitu dari Dinas PU Sleman untuk perbaikan dan penghalusan jalan dari bawah menuju Breksi sekitar 3 km dalam bentuk pengerasan parkir sisi utara dan belakang Tebing Breksi. Selain itu, PT Telkom membuat Balkondes (Badan Ekonomi Desa) beserta penginapannya (*homestay*). Kementerian Pariwisata memberikan bantuan berupa pembuatan *camping ground* sebelah barat *homestay*. Bantuan pembangunan fisik yang

terakhir berasal dari Kemendes untuk membuat *spot* foto yang ada di atas area kuliner.

Dana kedua diperoleh melalui retribusi karcis.

“Pada awal 2019 Desa Sambireto telah menetapkan Peraturan Desa (Perdes) Retribusi Nomor 11 tentang Tata Cara Pengelolaan Pariwisata Sambirejo, dan Peraturan Kepala Desa Nomor 51 tentang Peralihan Pewenang dari Desa menjadi Bumdes. Berdasarkan regulasi tersebut, besaran dana yang diambil dari karcis sebesar Rp5.000,00 untuk wisatawan domestik dan Rp10.000,00 untuk wisatawan mancanegara sedangkan karcis parkir kendaraan ditetapkan sebesar Rp2.000,00 untuk motor dan Rp5.000,00 untuk mobil.”

Sebanyak 100% uang retribusi yang masuk ke Tebing Breksi dibagi menjadi dua: 70% untuk pengelola, meliputi biaya operasional pengelolaan dan pengembangan; 30% untuk Bumdes. Besaran 30% persen Bumdes itu dibagi lagi menjadi 40% masuk ke PAD dan 40% untuk operasionalnya. Melalui retribusi karcis inilah wisatawan berkontribusi terhadap pengembangan komunitas.

b. Terciptanya Lapangan Pekerjaan Sektor Pariwisata

Penerbitan SK Gubernur tahun 2014 tentang kawasan *geoheritage* yang harus dilindungi membuat aktivitas pertambangan dihentikan. Sejak saat itu, aktivitas masyarakat di Tebing Breksi lesu, masyarakat harus mencari pekerjaan lain. Ada yang sambil menyupir namun ada juga yang masih menambang walaupun dalam batas yang telah ditentukan. Seiring berjalannya waktu, pada 2016 baru terlihat potensi yang ada di Breksi. Keyakinan itu terlihat dari

jumlah pengunjung yang terbilang cukup tinggi di Tebing Breksi. Pada hari biasa, Senin—Jumat jumlah pengunjung dapat mencapai sekitar 1000 wisatawan. Di akhir pekan atau hari libur pengunjung dapat mencapai 15.000 wisatawan. Kedatangan wisatawan tersebut merupakan peluang ekonomi bagi penduduk lokal, yaitu peluang kerja dan peluang usaha. Masyarakat berkesempatan ikut serta sebagai tenaga kerja dan pengelola yang ada di Tebing Breksi.

“Pada awalnya Tebing Breksi hanya hanya dikelola 5 orang. Setelah menjadi kawasan wisata, tidak kurang dari 300-350 KK (kepala keluarga) bekerja di sana.”

Berdasarkan kutipan Sekdes Sambirejo tersebut terbukti bahwa Tebing Breksi memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat setempat.

c. Timbulnya Pendapatan Masyarakat Lokal

Tidka dapat dipungkiri, berkembangnya Breksi menjadi kawasan wisata telah melahirkan kegiatan ekonomi baru bagi masyarakat Desa Sambirejo. Pendapatan masyarakat diperoleh dari kegiatan sebagai pengelola atau dari belanja makanan, minuman, oleh-oleh atau cinderamata yang dibeli wisatawan. Ada juga masyarakat yang menjadi penyewa mobil *jeep*, penjaga *homestay*, penjaga *spot-spot* foto di atas Tebing Breksi, menjadi pemandu wisata dan lain sebagainya. Keberhasilan tersebut dapat diukur dari indikator pendapatan masyarakat local berupa peningkatan kondisi ekonomi masyarakat itu sendiri.

“Dulu, wilayah ini serba tidak laku, serba *nanggung*, untuk bertani disini tidak hidup,

kalaupun hidup juga kurang bagus dikarenakan tekstur tanah yang kering dan banyak bebatuan. Selain itu, masyarakat yang dulu tidak pernah bermimpi mempunyai motor ataupun mobil, sekarang pada berani kredit motor ataupun kredit mobil.

Dampak yang dirasakan sudah jelas tetapi ketika ditanya apakah masyarakat Sambirejo merasakan semua itu, Kepala Desa Sambirejo menuturkan belum semua karena warga desa berjumlah sekitar 2000 KK dan yang terlibat hanya sekitar 350 KK. Tentunya ini membutuhkan waktu karena Breksi dianggap masih baru mulai digarap.

2. Prinsip Sosial

a. Peningkatan Kualitas Hidup

Peningkatan ekonomi jelas berdampak pada peningkatan kualitas hidup. Hal ini terlihat dari peningkatan pendidikan formal di masyarakat Tebing Breksi. Mereka yang dulunya banyak tidak melanjutkan sekolah sekarang sudah banyak yang sarjana. Selain itu, menurut pedagang souvenir, keberadaan Tebing Breksi sangat membantu menyejahterakan kehidupan penduduk sekitar. Keuntungan yang diperoleh sangat membantu perekonomian rumah tangga.

Peningkatan kualitas hidup tidak hanya terlihat dari pendidikan formal. Pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkompeten juga telah dilakukan oleh pemerintah daerah terkait, seperti dari Kementerian Desa, Kementerian Pariwisata, dan Dinas Pariwisata DIY dan Sleman. Hanya saja, dalam satu tahun perwakilan yang mengikuti pelatihan hanya 1 delegasi yang terdiri atas 5 atau 6 orang

pengelola. Program-program pelatihan yang dilakukan antara lain adalah pengelolaan pariwisata untuk mewujudkan *sapta pesona*, *training* pemandu wisata, pengelolaan kuliner yang lebih menekankan pada pengembangan SDM, pelatihan bahasa asing, dan masih banyak pelatihan lainnya.

Pelatihan demi pelatihan tentunya tidak mungkin jika tidak menemui kendala. Salah satu pengelola Tebing Breksi menuturkan sebagai berikut.

“Kemarin dari pengelola bersama pokdarwis menyewa guru les Bahasa Inggris. Semua pengelola ikut les tersebut. Namun, dari hari ke hari, peserta mundur satu per satu sampai habis SDM-nya. Maklumlah latar belakangnya demikian.”

Latar belakang pendidikan masyarakat yang dulunya lulusan SD, SMP bahkan ada buta huruf menjaid kendala untuk meningkatkan kapasitas kualitas SDM. Itu sebabnya, perlu konsistensi dalam mengikuti pelatihan. Saat ini pengelola banyak memberdayakan anak-anak muda yang baru lulus sekolah sebagai regenerasi dan mempunyai semangat belajar yang tinggi. Wisatawan yang datang ke Tebing Breksi tidak hanya berasal dari lingkungan domestik melainkan juga wisatawan mancanegara. Kondisi seperti itu membutuhkan kualitas SDM yang mumpuni.

Peningkatan kualitas hidup juga mempengaruhi perubahan sosial. Sekdes Sambirejo menceritakan perubahan sosial yang luar biasa. Misalnya, dulu keluarga penambang memiliki konsep, kalau sudah mencari uang, mengeluarkan atau membuangnya mudah. Dulu masyarakat suka minuman alcohol. Sekarang mereka merupakan pelaku

objek wisata sehingga harus menjadi penggerak pemberantas miras dan tidak mungkin mengonsumsi miras lagi. Itulah perubahan sosial yang secara signifikan terlihat oleh Sekdes Sambirejo.

Perubahan berikutnya terjadi pada penampilan *style* yang *mathing*. Dulu pemuda di Sambirejo itu tidak pernah memakai sepatu tetapi sekarang karena ada tuntutan dan belajar memberikan pelayanan yang baik, muncul kebiasaan harus bersepatu.

“Dulu orang-orang sering memakai celana pendek. Sekarang mereka harus rapi dengan seragam ketika melayani masyarakat atau pengunjung. Ketika melayani pengunjung, mereka tidak mau merokok.”

b. Peningkatan Kebanggaan Komunitas

Kebanggaan komunitas merupakan hal yang dirasakan positif terhadap sesuatu yang dibanggakan karena menjadi bagian dari komunitas tersebut. Masyarakat Sambirejo sangat bangga dengan Tebing Breksi. Kebanggaan tersebut tecermin dari antusiasme masyarakat pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan, misalnya gotong royong, ronda, dan sebagainya. Rasa bangga itu timbul ketika orang lain mengetahui ada wisata Breksi dan pernah berkunjung ke Breksi. Kebanggaan tersebut menimbulkan rasa percaya diri dan motivasi untuk mendorong pelayanan yang lebih baik lagi. Masyarakat Sambirejo juga menganggap Tebing Breksi merupakan berkah kehidupan yang diberikan Tuhan yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya.

c. Pembagian Peran yang Adil (Gender dan Usia)

Pembagian tugas dalam pengembangan kawasan wisata

Tebing Breksi tidak terlepas dari peran *gender* antara laki-laki dan perempuan. Pembagian peran menurut jenis kelamin laki-laki dan perempuan, baik yang muda ataupun yang tua, terbilang cukup aktif dalam kegiatan pengelolaan di Tebing Breksi. Akan tetapi, peran laki-laki lebih banyak ketimbang perempuan. Jika dikaitkan dengan jumlah penduduk di Desa Sambirejo bahwa perbandingan *sex ratio* antara laki-laki dan perempuan adalah 98,26 yang artinya 98 penduduk laki-laki berbanding dengan 100 penduduk perempuan.

Pada sektor pariwisata tergambar adanya kontruksi *gender* yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Konstruksi tersebut terlihat pada peran perempuan yang lebih cenderung pada pekerjaan teknis seperti menyiapkan hidangan makanan dan minuman (pramusaji).

Berdasarkan usia, pembagian peran ini sudah cukup adil karena sistem pengelolaan di Breksi selalu di-*rolling*. Semua orang dapat merasakan, misalnya hari ini ada yang bertugas di parkir, besok bertugas di pusat informasi, dan sebagainya. Generasi tua ditandai dengan umur dan sudah mempunyai keluarga sedangkan generasi muda secara umum ditandai dengan status belum menikah. Generasi mudalah yang menjadi kunci keberlanjutan pariwisata karena merupakan aset penting yang akan meneruskan perjuangan generasi tua.

d. Membangun Organisasi Manajemen Komunitas

Aspek dasar membangun organisasi manajemen komunitas ialah modal sosial yang berkembang di masyarakat sehingga pembangunan pariwisata lebih aktif dan produktif. Melekatnya nilai-nilai modal sosial dalam bermasyarakat

secara tidak langsung menumbuhkan rasa saling percaya. Jika modal sosial tidak kuat dapat dipastikan pembangunan pariwisata akan mengalami kegagalan karena rasa kepercayaan rendah, terjadi monopoli individu, bukan kerja komunitas.

Manajemen komunitas pada penduduk Sambirejo telah terlaksana dengan baik. Masyarakat memiliki pembagian tugas dan wewenang yang jelas dalam manajemen organisasi. Pembagian peran yang jelas tersebut membuat masyarakat semakin dimudahkan dalam mengelola organisasi. Organisasi yang ada di Breksi ialah pokdarwis (kelompok sadar wisata). Pengelola Tebing Breksi adalah Lowo Ijo. Pokdarwis dibentuk berawal dari kebijakan diberhentikannya penambangan di daerah Breksi. Akhirnya, dibentuklah pokdarwis yang tugasnya ialah memberi pengajaran pembinaan pariwisata terhadap masyarakat, mempromosikan wisata setempat, membantu pembinaan dan pengelolaan yang lebih baik sesuai sapta pesona.

Pengelola Tebing Breksi yang dinamakan Lowo Ijo dibentuk melalui Bumdes untuk mengelola segala kegiatan operasional yang ada di sana, seperti *ticketing*, parkir, atau kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di lokasi wisata Breksi. Dalam pengelolaan wisata Breksi sebagian besar pengelola merupakan anggota Pokdarwis sehingga antara Pokdarwis dan Lowo Ijo menjadi manajemen komunitas yang sinergis.

3. Prinsip Budaya

- a. Mendorong Masyarakat Menghormati Budaya Lain
Tempat wisata Tebing Breksi setiap pekannya menerima

wisatawan kurang lebih 10.000, terdiri atas wisatawan lokal dan asing dengan latar belakang budaya yang beragam, baik dari segi bahasa, agama, dan kultur yang berbeda. Dengan begitu, masyarakat yang menjadi pengelola di Breksi harus dapat beradaptasi dan menghormati perbedaan budaya tersebut. Pariwisata merupakan media hubung antaretnis sehingga pengelola harus berusaha untuk saling memahami dan mengerti. Dapat dikatakan bahwa selama ini budaya yang berkembang di masyarakat bukan hanya berupa kesenian melainkan juga kebiasaan sehari-hari yang menjadi pola hidup kebersamaan komunitas, yaitu guyub, rukun, saling menghormati, *unggah-ungguh*, dan yang muda menyayangi yang tua.

Secara internal, wisata Breksi membuat kultur budaya masyarakat berubah yang awalnya soliter, kini lebih mengedepankan kebersamaan. Selain itu, masyarakat Sambirejo juga lebih menghormati budaya lain dengan cara tidak mengganggu budaya dan sukunya lebih baik dari yang lain, tidak menjelekkkan budaya lain, juga menerima dan menghargai suku, budaya, dan agama lain.

- b. Membantu Perkembangan Pertukaran Budaya

Proses pertukaran budaya di Tebing Breksi diawali dengan proses interaksi antarwisatawan dan komunitas setempat. Melalui interaksi tersebut, secara tidak langsung telah terjalin hubungan dengan bertemu, berdialog, berkomunikasi dua arah, dan bertukar informasi sehingga memberi pengetahuan baru.

Komunikasi yang terjadi merupakan sarana bagi wisatawan dan komunitas untuk saling mengenal budaya masing-masing.

Interaksi tersebut dapat terjadi di mana saja, seperti di tempat makan (kuliner), toko souvenir, atau di pusat informasi pariwisata yang ada di Tebing Breksi. Retorikanya adalah sebagai pengguna jasa, wisatawan memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. Penduduk setempat menjadi penyedia jasa atau pelaku usaha. Interaksi antara wisatawan dan masyarakat menimbulkan pemikiran tentang produksi barang dan jasa yang dibutuhkan. Dalam proses interaksi tersebut masing-masing akan bertukar informasi. Proses pertukaran informasi di antara keduanya berdampak pada pertukaran budaya berupa pengetahuan, aktivitas, ide gagasan, bahkan benda. Akan tetapi, semua interaksi itu belum tentu menghasilkan pertukaran budaya, tergantung intensitas interaksi dan timbal balik dari kedua belah pihak.

Dalam pariwisata, pertukaran budaya ada yang berwujud fisik atau tampak oleh mata. Kita dapat menjumpainya pada benda hasil karya budaya, misalnya pakaian, penampilan fisik, gaya hidup, etika pergaulan, cara berinteraksi dengan sesama, Bahasa, serta nilai dan norma yang berkembang dalam budaya. Semua hal itu merupakan landasan bagi aktivitas budaya fisik.

c. Menanamkan Perkembangan dalam Budaya Lokal

Masyarakat Desa Sambirejo sangat menghormati dan menjaga Tebing Breksi karena merupakan warisan geologi dan sumber kehidupan yang harus dijaga sebaik-baiknya. Langkah yang dilakukan masyarakat Sambirejo dalam menjaga dan merawat Tebing Breksi ialah tidak pernah melakukan corat-coret di dinding bebatuan yang ada.

Masyarakat menyadari dan tidak sepenuhnya menggantungkan

tanggung jawab kepada pemerintah tetapi proaktif untuk mendorong perkembangan budaya lokal. Budaya keseharian yang tidak hilang pada masyarakat Breksi ialah saling guyup dan hidup rukun. Terkait kesenian, hampir setiap bulan mengadakan kegiatan yang menampilkan kesenian ketoprak, gamelan Jawa, dan kuda lumping. Budaya kebersamaan/kekompakan juga selalu ada pada masyarakat Breksi, seperti gotong-royong ketika orang lain mempunyai *gawe* (hajat) mantu, sunatan, dan lain-lain.

4. Prinsip Lingkungan

a. Pembelajaran tentang *Carrying Capacity* (Daya Dukung)

Mekanisme yang digunakan untuk melihat daya dukung di Tebing Breksi ialah menghitung daya tampung kawasan berdasarkan jumlah wisatawan yang tercatat dalam kunjungan dengan metode Cifuentes (1992). Metode ini merupakan hasil modifikasi penelitian Douglas yang dibuat oleh Fandeli (2002:261). Berikut ini adalah uraiannya.

$$PCC = A \times \frac{1}{B} \times Rf$$

PCC (*Physical Carrying Capacity*) adalah daya dukung fisik, yaitu batas maksimum dari kunjungan yang dapat dilakukan dalam satu hari.

A adalah luas area yang digunakan untuk wisata, yaitu 40.000 m².

B adalah luas area yang dibutuhkan oleh seorang wisatawan untuk berwisata dengan tetap memperoleh kepuasan, yaitu 5 m².

Rf adalah faktor rotasi.

$$40.000 \text{ m}^2 \times \frac{1}{5} \times 1 \text{ putaran} =$$

8.000/hari.

Dapat disimpulkan bahwa kapasitas daya dukung Breksi setiap hari adalah 8.000 pengunjung pada hari biasa. Artinya, angka tersebut

maish berada di ambang batas normal. Saat hari libur, wisatawan dapat mencapai 10.000. Artinya, ini melebihi ambang batas maksimal atau *overload*.

b. Manajemen Pengelolaan Sampah

Kebersihan lingkungan di Breksi dilakukan melalui petugas sampah yang melakukan piket untuk mengambil sampah setiap pagi dan sore hari. Selain itu, diadakan iuran dana kebersihan sebesar Rp2.000,00/hari. Iuran tersebut menjadi Rp5.000,00 pada hari libur (*weekend*) karena volume sampah yang ada juga meningkat. Setiap bulan diadakan grebek sampah atau bersih-bersih itu dilakukan oleh semua pelaku wisata. Langkah lainnya adalah selalu ada penyiraman untuk mengantisipasi debu pada musim kemarau. Bentuk kekompakan yang dilakukan tersebut merupakan wujud komitmen masyarakat untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih dan nyaman.

c. Kepedulian Terhadap Konsevasi
Perubahan-perubahan terus dilakukan oleh pengelola Breksi. Yang dulunya tidak tertata sekarang ditata. Yang dulunya tidak ada cadangan air sekarang dibuatkan *embung*. Artinya, ada upaya konservasi yang dilakukan pengelola. Upaya lain yang dilakukan pengelola adalah bekerja sama dengan kementerian, seperti Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, serta berbagai komunitas untuk melakukan konservasi dengan menanam bunga dan 300 pohon buah-buahan di sisi selatan Tebing Breksi.

5. Prinsip Politik

a. Adanya Partisipasi Masyarakat Lokal.
Partisipasi masyarakat lokal

merupakan kunci bagi pengembangan *CBT* di desa atau objek wisata. Aspek yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat ditandai dengan adanya akses. Melalui akses, masyarakat dapat terlibat dalam proses mengawasi/mengontrol pembangunan pariwisata, yaitu ikut serta dalam perencanaan, pengelolaan, serta pelaksanaan program pembangunan melalui organisasi/komunitas setempat.

Pengelola/komunitas di Tebing Breksi ialah masyarakat lokal. Berdasarkan hasil wawancara, konsep yang digunakan untuk pengembangan pariwisata di Breksi ialah *Community Based Tourism (CBT)*. *CBT* memposisikan masyarakat sebagai aktor utama dalam pembangunan pariwisata. Tanpa partisipasi dari masyarakat, *CBT* tidak akan bertahan lama. Berikut kutipan dari Dispar Sleman (23 Mei 2019).

“Kuncinya adalah tingkat partisipasi masyarakat. Kalau objek wisata mau maju, sebenarnya walaupun kita *supply* dengan apapun, kalau rasa memiliki tidak ada atau hanya *booming* sesaat, tidak akan terlihat”

Pariwisata harus tumbuh dari masyarakat melalui sistem *bottom-up*. Sama halnya dengan *CBT* yang harus tumbuh dari masyarakat dan dikelola oleh masyarakat itu sendiri, masyarakat sendiri juga bergerak dan berkeinginan untuk mengembangkan pariwisata.

b. Peningkatan Kekuasaan Komunitas yang Lebih Luas.

Peningkatan kekuasaan terkait dengan kebebasan dalam pengambilan keputusan. Masyarakat diberi kebebasan dalam meningkatkan potensinya. Konsep

CBT dilaksanakan masyarakat di Breksi mulai dari perencanaan, pemasaran, pengelolaan, dan pembagian keuntungan. Dalam proses tersebut, pengambilan keputusan dikuasakan sepenuhnya pada komunitas di Breksi.

Selain memberi kekuasaan penuh pada komunitas, untuk meningkatkan kekuasaan komunitas, setiap individu harus meningkatkan *skill*. Hal itu bisa dilakukan melalui pelatihan-pelatihan yang biasanya difasilitasi oleh Dinas Pariwisata setempat. Hal ini disebabkan SDM di Breksi masih kurang, pemahaman tentang sejarah Breksi belum diketahui semua orang, dan kemampuan berbahasa asing masih minim. Peningkatan kapasitas diri mendorong masyarakat untuk lebih berinovasi terhadap potensi pembangunan pariwisata yang ada di desa.

c. Mekanisme yang Menjamin Hak Masyarakat Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA).

Hak-hak yang menjamin masyarakat lokal dalam pengelolaan SDA disampaikan oleh Ketua Pokdarwis Desa Sambirejo (17 Mei 2019) sebagai berikut.

“Yang jelas, semua yang kami terapkan adalah *CBT*. Kami tidak berharap pada pihak swasta atau siapapun. Kami harus mandiri. Apapun kesalahan yang muncul, akan kami evaluasi dan perbaiki. Kami tetap percaya pada kemampuan kami masing-masing.”

Berdasarkan kutipan di atas, mekanisme yang dilakukan oleh masyarakat Sambirejo adalah memberdayakan masyarakat lokal dan menjamin hak masyarakat lokal sebagai aktor utama dalam pengelolaan di tempat wisata Breksi.

Pemerintah berperan sebagai fasilitator dan pendamping dalam pengembangan wisata di Breksi. Pengelola tidak bergantung pada pihak swasta karena akan mengambil hak mereka sebagai subjek utama dalam pengelolaan sumber daya alam di Breksi.

SIMPULAN

Melalui pengelolaan pariwisata di Tebing Breksi dapat disimpulkan bahwa konsep *CBT* mampu memberi dampak positif bagi sendi-sendi kehidupan masyarakat. Selain itu, potensi sumber daya alam yang ada di desa dapat dioptimalkan untuk mendatangkan manfaat pada masyarakat. Pada dasarnya, penerapan *CBT* di Tebing Breksi telah memenuhi prasyarat ideal. Berikut adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan oleh penulis sebagai berikut.

Evaluasi prinsip ekonomi *CBT* dalam pembangunan pariwisata di Tebing Breksi sudah berdampak positif pada pendapatan komunitas lokal. Tempat wisata ini menyerap tenaga kerja dari masyarakat lokal serta timbulnya dana yang bersumber dari wisatawan melalui retribusi karcis, usaha di tempat kuliner, *homestay*, penyewaan *jeep shiva plateu*, dan *spot-spot* foto di atas tebing Breksi. Akan tetapi, masih terdapat indikator yang perlu dioptimalkan yaitu pendapatan masyarakat lokal. Jika dikatakan Breksi telah mampu memberikan manfaat ekonomi, temuan di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua lapisan masyarakat Sambirejo merasakan dampak ekonomi tersebut.

Evaluasi prinsip sosial *CBT* dalam pembangunan pariwisata di Tebing Breksi berdampak pada peningkatan kualitas hidup komunitas. Hal itu dapat dilihat dari perubahan sosial tentang cara berpenampilan yang lebih rapi, nilai pelayanan dan perlakuan terhadap tamu, serta peningkatan kualitas pendidikan

formal maupun nonformal. Ada satu indikator yang masih belum optimal yaitu indikator pembagian peran *gender* dan usia yang adil dalam pengelolaan wisata Tebing Breksi. Peran laki-laki dalam komunitas di Breksi sangat mendominasi dibanding perempuan.

Evaluasi prinsip budaya di Tebing Breksi berdampak pada terbukanya budaya yang ada di masyarakat melalui interaksi dengan wisatawan dan pertukaran informasi budaya terjadi. Kondisi itu menjadi pengetahuan baru bagi komunitas yang memiliki dampak positif yaitu masyarakat menghormati dan saling menghargai budaya lain.

Evaluasi prinsip lingkungan dilihat dari pengelolaan sampah yang sudah tertata baik, kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah juga cukup baik. Ada indikator yang perlu mendapat perhatian, yaitu *carrying capacity* daya dukung fisik di Breksi yang masih dibawah ambang batas maksimal pada hari biasa namun melebihi ambang batas pada saat hari libur. PCC (*physical carrying capacity*) di wisata Breksi menunjukkan bahwa daya dukung fisik di Tebing Breksi melebihi kapasitas.

Evaluasi prinsip politik *CBT* dalam pembangunan pariwisata di Tebing Breksi ditandai dengan adanya kesadaran komunitas terhadap kepentingan yang harus dikelola bersama. Ada kesadaran komunitas mengenai aspek kelembagaan untuk merawat dan mengembangkan wisata Tebing Breksi. Yang terpenting ialah ada partisipasi yang dilakukan masyarakat untuk ikut terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam dan hak masyarakat dalam pengambilan keputusan.

SARAN

Sebagai salah satu objek wisata yang terbilang baru tetapi populer dengan jumlah kunjungan wisatawan yang

tinggi, perlu dilakukan kajian ilmiah yang lebih mendalam mengenai daya dukung objek wisata meliputi daya dukung fisik, daya dukung yang nyata, dan daya dukung efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Creswell, John W. 2014. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Terjemahan, edisi ketiga. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Demartoto, Argyo & Sugianti, Rara. 2009. *Kemiskinan dan Pariwisata Sebuah Realitas Sosial. Di dalam. Pembangunan Pariwisata Berbasis Masyarakat*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Denzin, N.K. dan Lincoln Y. 2009. *Handbook of Qualitative Research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Moleong, Lexy J. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Bandung.

Jurnal

- Anstrand, M. 2006. "Community-Based Tourism and Socio-Culture Aspect Relating to Tourism A Case Study of A Swedish Student Excursion to Babati (Tanzania)". Laporan. Tidak diterbitkan.
- Garrod, Brian. 2001. *Local Partisipation in The Planning and Management of Eco - tourism: A Revised Model Approach* Bristol: University of the West of Eng -land.
- Gill, A. M., & Reed, M. G. (1997). *The reimagining of a Canadian resource town: Postproductivism in a North American context*. Applied Geographic Studies, 1(2), 129–147.
- Hausler, Nicole. (2005). *Planning for Community Based Tourism*. Sumber: repository.upi.edu/21562/9/S_MPP_1202549_Bibliography.pdf.
- Inskeep E. 1991 *Tourism Planning, an Integrated and Sustainable Development Approach*. New York: Van Nostrand Reinhold.

- Johnson, P. Alan. 2010. *Realizing Rural Community Based Tourism Development: Prospect for Social-Economy Enterprises*. Jurnal of Rural and Community Development, Vol.3, No.1
- Li, W.J., 2006. "Community Decision Making: Participation in Development", *Ann. of Tour. Res.*, 33(1), hal. 132-143
- Mowforth, M., & Munt, I. (2003). *Tourism and sustainability: Development and new tourism in the Third World* (2nd ed.). London: Routledge.
- Murphy, P.E., *Tourism: A Community Approach* (London: Methuen, 1985).
- Ndlovu, Jordan, et al. 2012. "Community Based Tourism in Twyfelfontein Consecrancy: Exploring Local Community's Involvement". *International Journal of Hospitality & Tourism Systems*. Vol.4, Issue.2.
- Othman, Fadina, Szali, F., & Mohamed, B. 2013 *Rural and Community Based Tourism Development in Malaysia: Prospect for Homestays as a Social Economy Enterprise*. Vol.10 Issue 1
- Saville, N. M. 2001. "Practical Strategies for Pro-Poor Tourism: Case Study of Pro Poor Tourism and SNV in Humla District, West
- Suansri, Potjana. 2003. *Community Based Tourism Handbook* Thailand: REST Project.
- Sutawa, Gusti. K. 2012. "Issues on Bali Tourism Development and Community Empowerment to Support Sustainable Tourism Development". Dalam *Procedia Economics and Finance* 4. 413-422
- Woodley, A. 1993. "Tourism and Sustainable Development: The Community Perspective". In J. G. Nelson, R. Butler, & G. Wall (Eds.), *Tourism and Sustainable Development: Monitoring, Planning, Managing* (pp. 135–147). Waterloo: University of Waterloo, Heritage Resources Centre. Nepal". *PPT-Working Paper* No. 3.
- <http://mediaindonesia.com/read/detail/97074-tebing-breksi-nan-dramatis> Diakses 25 Juni 2019
- Pariwisata.Slemankab.go.id Tebing Breksi, Bekas Tambang yang Jadi Wisata Kekinian. Melalui: <https://pariwisata.slemankab.go.id/2018/01/19/tebing-breksi-bekas-tambang-yang-jadi-wisata-kekinian/> Pada Tanggal 15 Desember 2019
- Kebudayaan.Kemdikbud.go.id Penguatan Potensi Membangun Kualitas Masyarakat. Melalui: <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbyogyakarta/wpcontent/uploads/sites/37/2017/01/Jurnal-Widya-Prabha-No.-05-V-2016.pdf> Pada Tanggal 15 Desember 2019
- TebingBreksi.net Informasi dan Sejarah Objek Wisata Tebing Breksi. Diakses 22 Agustus 2019. Melalui: <http://tebingbreksi.net/2018/10/12/informasi-dan-sejarah-obyek-wisata-tebing-breks>

Media Online

Mediaindonesia, 2017. Tebing Breksi nan Dramatis.